



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

Pada:
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor: 700.1.2.1/824/INSP/2025

Tanggal: 21 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 700.1.2.1/824/INSP/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tanggal 23 Desember 2024;

8. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/4/INSP/2025 tanggal 23 Januari 2025, tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/17/INSP/2025, tanggal 10 Maret 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret s.d. 12 Maret 2025 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev. : | Penanggung Jawab |
| 2. Rina Deswalti, S.E. | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Yefrial, S.H., MM. | : Pengendali Mutu |
| 4. Andri Milda, S.E., M.M. | : Pengendali Teknis |
| 5. Rici Isnanda, S.A.P. | : Ketua Tim |
| 6. Mamik Supriyati, S.E., M.M. | : Anggota |
| 7. Ibrahim, S.H. | : Anggota |
| 8. Donis Prianto, S.H. | : Anggota |
| 9. Yasinta Faranita, S.E. | : Anggota |
| 10. Sri Aria Putri, S.E. | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

H. Objek yang Dievaluasi:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Metodologi Evaluasi:

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara Terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja *outcome*.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 700.1.2.1/699/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap semua rekomendasi evaluator sudah ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator.

B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnyaak untabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

- A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh nilai 89,54 dengan kategori A “ Memuaskan” dengan pengertian “Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,89
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,81
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,46
4	Evaluasi Internal	25,00	22,38
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		89,54
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah menyediakan Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diformalkan, memenuhi kriteria SMART, di publikasikan dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Namun demikian, masih terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria yang telah ditetapkan belum dilaksanakan setiap bulan;
- b. Setiap unit/satuan kerja dan seluruh Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi dan Realisasi Rencana Aksi secara periodik atau triwulan, sesuai SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

Namun demikian, masih terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Setiap level organisasi belum melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Laporan Kinerja yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

penyempurnaannya. Laporan Kinerja telah memenuhi Standar, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai SOP Pemantauan capaian kinerja internal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
- c. Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD.

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar melakukan monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan;
- b. Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2. Pengukuran Kinerja

Agar setiap level organisasi melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, berkala dan data dukung yang lengkap.

3. Pelaporan Kinerja

Agar Informasi dalam laporan kinerja diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Laporan ini diterima, terima kasih.



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19780528 200501 2 004

**LEMBAR KERJA EVALUASI
(LKE)**

**Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2024**

Pada

**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

Evaluator Irban II :
Yasinta Faranita, S.E
NIP. 19960115 202012 2 017

Nama Evaluator : YASINTA FARANITA, SE

Tim : IRBAN II

Wilayah : KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun : 2024

Nama Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,06	26,89
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,36	25,81
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,56	14,46
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,00	22,38
Nilai Akuntabilitas Kinerja			89,98	89,54
			A	A

No	Catatan
1	Monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria yang telah ditetapkan belum dilaksanakan setiap bulan;
2	Setiap unit/satuan kerja dan seluruh Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
3	Setiap level organisasi belum melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala;
4	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
5	aHasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
6	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
7	Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD.

No	Rekomendasi
1	Agar melakukan monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan;
2	Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan;
3	Agar setiap level organisasi melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, berkala dan data dukung yang lengkap.
4	Agar Informasi dalam laporan kinerja diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
6	Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

LEMBAR KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
		JAWABAN	NILAI		
1	2	3	4	5	10
I. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	89,63%	26,89	
I.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (20%)	6,00	100,00%	6,00	
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	Y	1		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	Y	1		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Y	1	OK	
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Y	1	OK	
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Y	1		
6	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Y	1	OK	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (30%)	9,00	100,00%	9,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan	A	1	OK	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan	A	1	OK	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	A	1		KKE1B3-4
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	A	1		KKE1B3-4
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	A	1		KKE1B5
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	A	1		KKE1B6-7
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	A	1		KKE1B6-7
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	A	1	OK	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Y	1	OK	
10	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	A	1	OK	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (50%)	15,00	79,25%	11,89	
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	B	0,75	OK	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	B	0,75	OK	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .	B	0,75		KKE1C3-4
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	B	0,75	OK	
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	B	0,67	OK	
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	B	0,67	OK	
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	A	1	OK	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	A	1	OK	
II. PENGUKURAN KINERJA (30%)		30,00	86,04%	25,81	
II.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan (20%)	6,00	100,00%	6,00	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	A	1		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	A	1		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	A	1	OK	
II.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (30%)	9,00	88,14%	7,93	B
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja	Y	1		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	B	0,75	OK	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	B	0,75	OK	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	A	1		
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	1		KKE1C3-4
6	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	B	0,67	OK	
7	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Y	1	OK	

II.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (50%)	15,00	79,20%	11,88	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		A	1	OK
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		A	1	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		A	1	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		A	1	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		B	0,5	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		B	0,5	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		B	0,5	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		B	0,67	OK
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		B	0,75	OK
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		A	1	OK
III. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	96,43%	14,46	
III.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (20%)	3,00	100,00%	3,00	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Y	1	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Y	1	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Y	1	OK
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.		Y	1	OK
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Y	1	OK
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Y	1	OK
III.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan (30%)	4,50	100,00%	4,50	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		Y	1	OK
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		A	1	OK
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.		A	1	OK
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		A	1	OK
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		A	1	OK
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		A	1	OK
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.		A	1	OK
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		A	1	OK
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		Y	1	OK
III.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (50%)	7,50	92,86%	6,96	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		A	1	
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		A	1	OK
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		A	1	OK
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		A	1	OK
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		A	1	OK
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		A	1	OK
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		B	0,5	OK
IV. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)		25,00	89,50%	22,38	
IV.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (20%)	5,00	100,00%	5,00	
1	Terdapat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.		A	1	
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		A	1	
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		A	1	

IV.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (30%)	7,50	90,00%	6,75		
1	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP.		Y	1	OK	
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		Y	1	OK	
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		B	0,5	OK	
4	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		A	1	OK	
5	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Y	1	OK	
IV.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (50%)	12,50	85,00%	10,63		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti.		A	1	OK	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD		A	1	OK	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		B	0,75	OK	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		B	0,75		
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD		B	0,75	OK	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00		89,54	A	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "Y/T"

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "A/B/C/D/E"

**KERTAS KERJA EVALUASI
(KKE)**

**Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2024**

Pada

**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

**Evaluators Urban II :
Yasinta Faranita, S.E
NIP. 19960115 202012 2 017**

KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI

[illegible]

SASARAN	KINERJA UTAMA	SASARAN MENGGAMBARKAN ISU STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL	INDIKATOR SASARAN	IKU
RENSTRA SKPD Terdapatnya Pemintahan yang akuntabel dan berkinerja	Y	Y	Y	Nilai AKIP BKPSDM	Y
			1		Y/T
					Y/T
					Y/T
					Y/T
Meningkatnya Daya Seng ASN				Indeka Profesionalitas ASN	Y
				Indeka Merit Sistem	Y
	Y	Y	Y		Y/T
					Y/T
					Y/T
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				Nilai Kamatangan Inovasi BKPSDM	Y
					Y/T
	Y	Y	Y		Y/T
					Y/T
					Y/T
		100.00%	100.00%		

NO	SASARAN	SAMA DENGAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SAMA DENGAN RENSTRA	CAPAIAN	PERBANDINGAN CAPAIAN DG N-1
	IP					
	OUTCOME					
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	SAMA	Nilai AKIP BKPSDM	SAMA	99,98%	99,98%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	SAMA	Nilai Kematangan Inovasi	SAMA	90,00%	105,88%
3	Meningkatnya Daya Saing ASN	SAMA	Indeks Profesionalitas ASN	SAMA	113,23%	99,37%
			Indeks Merit Sistem		104,12%	106,90%
						101,83%

NO	SASARAN	SAMA DENGAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SAMA DENGAN RENSTRA	CAPAIAN	PERBANDINGAN CAPAIAN DG N-1
	IP					
	OUTCOME					
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	SAMA	Nilai AKIP BKPSDM	SAMA	99,98%	99,98%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	SAMA	Nilai Kematangan Inovasi	SAMA	90,00%	105,88%
3	Meningkatnya Daya Saing ASN	SAMA	Indeks Profesionalitas ASN	SAMA	113,23%	99,37%
			Indeks Merit Sistem		104,12%	106,90%
					101,83%	103%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN dan SASARAN IP[illegible]

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BERKELANJUTAN SELAMA PERIODE RENSTRA	MENGGAMBARKAN KONDISI		KUALITAS TARGET					JUMLAH	KUALITAS TARGET
				SELARAS RP JMD	SELARAS RENSTRA	RELEVAN DENGAN INDIKATOR SMART	BASIS DATA MEMADAI	LOGIS				
1	IKU SKPD Tervujudnya Pernerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP BKPSDM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	5	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
2	Meningkatnya Daya Sang ASN	Indeks Profesionalitas ASN Indeks Ment Sistem	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	5	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	5	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai
			Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Y/T	Belum Dilai	Belum Dilai	Belum Dilai	0	Belum Dilai

5007